

Pengaruh Corporate Governance terhadap Sustainability Report pada Perusahaan Sektor Energi dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024

Aina Syifa¹, Arin Salsabila², Nuralia Shafira Khoirun Nisa³, Gea Audre Hapsari Wasasi Purwanto⁴, Zahwa Fadillatur Rizqiya⁵, Rohmawati Kusumaningtias⁶, Ambar Kusumaningsih⁷

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

24080694011@mhs.unesa.ac.id¹, 24080694040@mhs.unesa.ac.id²,
24080694078@mhs.unesa.ac.id³, 240806940141@mhs.unesa.ac.id⁴,
24080694202@mhs.unesa.ac.id⁵, rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id⁶,
ambarkusumaningsih@unesa.ac.id⁷

Submitted: 16th May 2026 | **Edited:** 30th June 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Syifa, A., Salsabila, A., Nisa, N. S. K., Purwanto, G. A. H. W., Rizqiya, Z. F., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2026). Pengaruh Corporate Governance terhadap Sustainability Report pada Perusahaan Sektor Energi dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 1440-1450.

ABSTRACT

The increasing demand for corporate transparency regarding environmental, social, and governance (ESG) practices has encouraged companies to improve the quality of sustainability reporting. However, previous studies have reported inconsistent findings regarding the role of corporate governance in sustainability report disclosure, particularly in environmentally sensitive industries. This study aims to examine the influence of corporate governance on sustainability report disclosure in energy and mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. A quantitative associative approach was employed using secondary data obtained from annual reports and sustainability reports. The sample consisted of 16 companies selected through purposive sampling, resulting in 48 firm-year observations. Sustainability report disclosure was measured using the Global Reporting Initiative (GRI) disclosure index, while corporate governance was represented by the board of commissioners, independent commissioners, and the audit committee. Multiple linear regression analysis was applied to test the proposed relationships. The findings indicate that corporate governance variables jointly have a significant effect on sustainability report disclosure. Partially, only the audit committee demonstrates a positive and significant influence, whereas the board of commissioners and independent commissioners do not show significant effects. These findings highlight the importance of an effective audit committee in strengthening corporate transparency and accountability in sustainability reporting within the energy and mining sectors.

Keywords: Corporate Governance, Sustainability Report, Audit Committee, GRI Disclosure, Energy Sector

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik bisnis global telah menggeser orientasi perusahaan dari sekadar pencapaian kinerja keuangan menuju penciptaan nilai yang berkelanjutan. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga berdasarkan akuntabilitas terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Pergeseran tersebut semakin menguat seiring meningkatnya perhatian investor, regulator, dan masyarakat terhadap implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting). Pada sektor energi dan pertambangan, tuntutan tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik industrinya memiliki risiko lingkungan yang tinggi, seperti eksploitasi sumber daya alam, emisi karbon, pencemaran, dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, perusahaan dituntut menyampaikan informasi keberlanjutan secara transparan melalui sustainability report sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Ulupui et al., 2023; Wahyudi, 2021).

Di Indonesia, komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan. Meskipun demikian, kualitas pengungkapan sustainability report antarperusahaan masih menunjukkan variasi yang cukup tinggi, khususnya pada sektor energi dan pertambangan yang memiliki tingkat sensitivitas lingkungan lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pengungkapan yang memadai. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas pengungkapan tersebut adalah penerapan corporate governance sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Mekanisme tata kelola yang efektif diharapkan mampu memastikan bahwa informasi keberlanjutan disajikan secara lengkap, relevan, dan dapat dipercaya sehingga meningkatkan legitimasi perusahaan di mata publik (Suryana & Setiany, 2023; Elfira & Tasman, 2024).

Hubungan antara corporate governance dan sustainability report telah banyak dikaji, namun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa mekanisme corporate governance, khususnya komite audit dan dewan komisaris, mampu meningkatkan kualitas maupun tingkat pengungkapan sustainability report karena fungsi pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan manajemen (Sari, 2024; Nurdina & Maghviroh, 2025; Wulandari & Ayu, 2026). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris maupun komisaris independen belum tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report karena fungsi pengawasan sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya berorientasi pada isu keberlanjutan (Suryana & Setiany, 2023; Elfira & Tasman, 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, masih terdapat research gap mengenai efektivitas mekanisme corporate governance dalam meningkatkan pengungkapan sustainability report, khususnya pada perusahaan sektor energi dan pertambangan di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan periode pengamatan sebelum implementasi pelaporan keberlanjutan berkembang secara luas dan sebelum meningkatnya perhatian terhadap isu ESG, sedangkan penelitian yang menggunakan periode terbaru masih menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, sebagian penelitian mengombinasikan berbagai sektor industri sehingga karakteristik perusahaan dengan

tingkat risiko lingkungan yang tinggi belum memperoleh perhatian secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada perusahaan sektor energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024 dengan menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit sebagai proksi corporate governance serta indeks Global Reporting Initiative (GRI) sebagai dasar pengukuran pengungkapan sustainability report.

Berdasarkan uraian tersebut, novelty penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor energi dan pertambangan selama periode 2022–2024, yaitu periode ketika implementasi pelaporan keberlanjutan dan perhatian terhadap praktik ESG semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi, teori stakeholder, dan teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan transparansi pelaporan keberlanjutan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi regulator, investor, dan manajemen perusahaan dalam memperkuat efektivitas mekanisme corporate governance untuk meningkatkan kualitas pengungkapan sustainability report sebagai bagian dari praktik bisnis yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Dalam kondisi tersebut, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham sehingga berpeluang melakukan tindakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, penerapan mekanisme corporate governance diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Menurut Al Amosh dan Khatib (2022), mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan sehingga dapat menurunkan asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan bahwa dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit berperan dalam mendorong perusahaan mengungkapkan sustainability report secara lebih komprehensif.

Selain teori agensi, penelitian ini menggunakan Teori Stakeholder yang menyatakan bahwa keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan berbagai kelompok yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Menurut Raimo et al. (2021), pengungkapan sustainability report merupakan media komunikasi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perusahaan dengan mekanisme corporate governance yang baik cenderung lebih terdorong untuk menyampaikan informasi keberlanjutan secara transparan.

Selanjutnya, Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh penerimaan sosial melalui kesesuaian antara aktivitas operasional dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Pada sektor energi dan pertambangan yang memiliki risiko lingkungan tinggi, pengungkapan sustainability report menjadi salah satu bentuk legitimasi perusahaan atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang

ditimbulkan. Orazalin dan Mahmood (2021) menjelaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang efektif mampu memperkuat kredibilitas pelaporan keberlanjutan sehingga meningkatkan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, manajemen, dan pihak lain dalam rangka mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam penelitian ini, corporate governance diproksikan melalui ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. Dewan komisaris berfungsi mengawasi kebijakan manajemen, komisaris independen menjaga objektivitas pengambilan keputusan, sedangkan komite audit memastikan kualitas pelaporan keuangan maupun nonkeuangan perusahaan. Penelitian Khan et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan, terutama melalui peran aktif komite audit dalam proses pengawasan.

Sustainability report merupakan laporan yang mengungkapkan kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Penyusunannya mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021, yang terdiri atas Universal Standards, Sector Standards, dan Topic Standards, sehingga perusahaan dapat menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih komprehensif, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Menurut Michelin et al. (2020), penerapan standar GRI meningkatkan kualitas dan kredibilitas pengungkapan informasi keberlanjutan, khususnya pada perusahaan yang beroperasi di sektor dengan risiko lingkungan tinggi. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan sustainability report dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks GRI sebagai indikator transparansi perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, teori stakeholder, dan teori legitimasi, dapat dijelaskan bahwa mekanisme corporate governance berperan sebagai sistem pengawasan yang mendorong perusahaan menyampaikan informasi keberlanjutan secara lebih transparan. Dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan sustainability report sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Atas dasar tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa (H1) dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, (H2) komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, dan (H3) komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report dan sustainability report yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan laman resmi masing-masing perusahaan. Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor energi dan subsektor pertambangan mineral dan logam yang tercatat di BEI selama periode pengamatan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut selama periode 2022–2024, menerbitkan sustainability report secara terpisah dari laporan tahunan, serta memiliki data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 16

perusahaan sebagai sampel penelitian sehingga menghasilkan 48 observasi (firm-year observations). Variabel dependen berupa pengungkapan sustainability report diukur menggunakan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) berdasarkan GRI Standards 2021 dengan metode content analysis, yaitu memberikan skor 1 apabila suatu indikator diungkapkan dan skor 0 apabila tidak diungkapkan, kemudian dihitung menggunakan perbandingan antara jumlah indikator yang diungkapkan dengan jumlah indikator yang seharusnya diungkapkan. Variabel independen berupa corporate governance diproksikan melalui ukuran dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris, komisaris independen yang diukur menggunakan proporsi komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris, serta komite audit yang diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (Global Reporting Initiative, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model memenuhi asumsi regresi. Mengingat data penelitian merupakan kombinasi data cross section dan time series, analisis dilakukan melalui pendekatan regresi data panel dengan terlebih dahulu menentukan model terbaik menggunakan Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test sehingga diperoleh model yang paling sesuai, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), serta koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengetahui kemampuan variabel corporate governance dalam menjelaskan variasi pengungkapan sustainability report. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27 dan EVIEWS 13 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% agar hasil pengujian dapat memberikan gambaran empiris yang lebih akurat mengenai hubungan antarvariabel penelitian (Hair et al., 2022; Gujarati & Porter, 2021).

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		48
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96755889
	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.067
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.232
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.222
	Upper Bound	.243

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Selain itu, nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,318 juga berada di atas 0,05 sehingga semakin memperkuat bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, data penelitian layak digunakan untuk analisis regresi karena residual telah menyebar secara normal dan tidak menunjukkan penyimpangan distribusi yang dapat memengaruhi ketepatan estimasi model. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan sustainability report dapat dianalisis menggunakan model regresi linear. Menurut Hair et al. (2022), terpenuhinya asumsi normalitas menjadi salah satu prasyarat penting agar pengujian statistik menghasilkan estimasi parameter yang tidak bias.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640	.410	.370	.07657	1.081

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,370, yang menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pengungkapan sustainability report sebesar 37%. Sementara itu, 63% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, tekanan pemangku kepentingan, kepemilikan institusional, maupun karakteristik industri. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara mekanisme corporate governance dan pengungkapan sustainability report. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan, tetapi juga oleh karakteristik perusahaan dan faktor eksternal lainnya.

Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.179	3	.060	10.184	<.001
	Residual	.258	44	.006		
	Total	.437	47			

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,184 dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan corporate governance sebagai suatu sistem pengawasan memiliki kontribusi terhadap peningkatan transparansi pelaporan keberlanjutan perusahaan. Temuan tersebut mendukung penelitian Ulupui et al. (2023) yang menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan secara keseluruhan berperan dalam meningkatkan kualitas

pengungkapan sustainability report, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor dengan tingkat risiko lingkungan yang tinggi.

Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standarized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.681	.100		6.785	<.001
X1	.004	.003	.184	1.463	.150
X2	-.219	.230	-.122	-.952	.346
X3	.009	.002	.607	5.131	5.131

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji parsial menunjukkan bahwa setiap variabel corporate governance memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel dewan komisaris (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi 0,150, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan komisaris belum mampu meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan secara nyata.

Selanjutnya, variabel komisaris independen (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,167 dengan nilai signifikansi 0,346, sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen pada perusahaan sektor energi dan pertambangan masih belum sepenuhnya efektif dalam mendorong transparansi informasi keberlanjutan.

Berbeda dengan kedua variabel sebelumnya, komite audit (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,181 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif fungsi komite audit, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa komite audit memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan mekanisme corporate governance lainnya dalam memastikan kualitas pelaporan keberlanjutan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sari (2024) yang menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu organ tata kelola yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pengungkapan sustainability report melalui fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan perusahaan.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Sustainability Report

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris belum mampu meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan pada perusahaan sektor energi dan pertambangan. Secara empiris, keberadaan dewan komisaris lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan secara umum terhadap kebijakan perusahaan dibandingkan melakukan pengawasan secara spesifik terhadap penyusunan laporan keberlanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan jumlah anggota dewan komisaris tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengungkapan informasi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Berdasarkan Agency Theory, dewan komisaris seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen melalui peningkatan transparansi informasi. Namun, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal dalam mendorong pengungkapan sustainability report. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota dewan komisaris, tetapi juga oleh kompetensi, independensi, dan perhatian dewan terhadap isu keberlanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wahyudi (2021) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Demikian pula, Elfira dan Tasman (2024) menjelaskan bahwa keberadaan dewan komisaris belum tentu meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan apabila fungsi pengawasan terhadap aspek ESG belum menjadi prioritas perusahaan. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan penelitian Khan et al. (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris yang efektif mampu meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan melalui pengawasan terhadap kebijakan manajemen. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan sektor energi dan pertambangan di Indonesia yang masih lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi dibandingkan penguatan tata kelola keberlanjutan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Sustainability Report

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen pada perusahaan sektor energi dan pertambangan belum mampu memberikan tekanan yang cukup kuat kepada manajemen untuk meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan. Keberadaan komisaris independen masih lebih banyak diarahkan untuk memenuhi ketentuan regulator dibandingkan memperkuat pengawasan terhadap implementasi praktik keberlanjutan.

Menurut Stakeholder Theory, komisaris independen memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan melalui pengawasan yang objektif. Akan tetapi, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Rendahnya pengaruh komisaris independen dapat disebabkan oleh keterbatasan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan strategis maupun masih terbatasnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan dalam agenda pengawasan perusahaan.

Temuan ini mendukung penelitian Suryana dan Setiany (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas sustainability report pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Yanti et al. (2025) yang menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan karena fungsi pengawasannya masih bersifat administratif. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan Orazalin dan Mahmood (2021) yang menemukan bahwa independensi dewan mampu meningkatkan kualitas pelaporan ESG pada negara dengan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih matang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen masih dipengaruhi oleh budaya tata kelola dan karakteristik kelembagaan di masing-masing negara.

Pengaruh Komite Audit terhadap Sustainability Report

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin efektif komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan. Komite audit memiliki keterlibatan yang lebih intensif dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan

regulator sehingga mampu mendorong penyusunan sustainability report yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif Agency Theory, komite audit merupakan mekanisme pengawasan yang secara langsung mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Sementara itu, berdasarkan Legitimacy Theory, pengungkapan informasi keberlanjutan menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, komite audit memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan disajikan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari (2024) yang menyatakan bahwa komite audit merupakan mekanisme corporate governance yang paling berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Al Amosh dan Khatib (2022) yang menjelaskan bahwa efektivitas komite audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan melalui pengawasan yang lebih intensif terhadap proses penyusunan laporan perusahaan. Selain itu, Velte (2022) menyimpulkan bahwa komite audit yang memiliki kompetensi dan independensi yang memadai cenderung menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih berkualitas dan lebih dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Implikasi Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan, namun efektivitas setiap mekanisme tidak sama. Dewan komisaris dan komisaris independen belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan komite audit terbukti menjadi mekanisme pengawasan yang paling efektif. Temuan ini memperkuat Agency Theory, yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi, sekaligus mendukung Stakeholder Theory dan Legitimacy Theory, yang menjelaskan bahwa transparansi pelaporan keberlanjutan merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa perusahaan sektor energi dan pertambangan perlu memperkuat kapasitas komite audit melalui peningkatan kompetensi anggota, frekuensi rapat, serta pengawasan terhadap implementasi pelaporan keberlanjutan sesuai GRI Standards 2021. Selain itu, regulator dapat mendorong peningkatan efektivitas dewan komisaris dan komisaris independen melalui penguatan fungsi pengawasan terhadap aspek ESG, sehingga pengungkapan sustainability report tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance melalui dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan mekanisme corporate governance berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Namun, secara parsial hanya komite audit yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan dewan komisaris dan komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan

bahwa efektivitas pengungkapan sustainability report lebih ditentukan oleh kualitas fungsi pengawasan yang dijalankan komite audit dibandingkan oleh struktur dewan komisaris atau proporsi komisaris independen.

Temuan penelitian ini memperkuat Agency Theory, Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui pengungkapan informasi keberlanjutan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu mengoptimalkan peran komite audit dalam mengawasi penyusunan sustainability report sesuai dengan GRI Standards 2021, sementara regulator perlu mendorong peningkatan efektivitas fungsi dewan komisaris dan komisaris independen agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga mampu memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan tiga indikator corporate governance dan objek penelitian pada sektor energi dan pertambangan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sektor, periode pengamatan, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas pengungkapan sustainability report.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amosh, H., & Khatib, S. F. A. (2022). Corporate governance and sustainability reporting quality: The moderating role of board gender diversity. *International Journal of Disclosure and Governance*, 19(3), 220-236.
- El Maghviroh, R. (2025). The Influence of Good Corporate Governance on Sustainability Reporting: The Moderating Role of Leverage. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 10(3).
- Elfira, G., & Tasman, A. (2024). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: Anexamination In Energy And Mining COMPANIES. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, 4(2), 65-75.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 1: Foundation 2021*. Global Reporting Initiative.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). *Basic econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate data analysis* (9th ed.). Cengage Learning.
- Khan, I., Khan, I., & Saeed, B. B. (2021). Does corporate governance influence sustainability reporting? Evidence from emerging economies. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 21(7), 1161-1179.
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2020). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Accounting Forum*, 44(2), 101-122.
- Orazalin, N., & Mahmood, M. (2021). Toward sustainable development: Board characteristics, country governance, and environmental, social, and governance performance. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3565-3584.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Raimo, N., Caragnano, A., Zito, M., Vitolla, F., & Mariani, M. (2021). Extending the benefits of ESG disclosure: The effect on corporate reputation and firm value. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(5), 1412-1421.
- Sari, D. N. (2024). Pengaruh mekanisme good corporate governance, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap sustainability report disclosure. *Review of Accounting and Business*, 4(1), 46-58.
- Sial, M. S., Chunmei, Z., Khan, T., & Nguyen, V. K. (2021). Corporate social responsibility, firm performance and the moderating effect of corporate governance. *Sustainability*, 13(6), 1-18.
- Suryana, I. M., & Setiany, E. (2023). Effect of stakeholder pressure and corporate governance on sustainability reports disclosure: Empirical study on mining sector companies in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 5(2), 59-67.
- Ulupui, I. G. K. A., Muhammad, G., & Musyaffi, A. M. (2023). Environmental sustainability disclosure in sustainability reports: Mining, oil, and gas companies on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Management and Sustainability*, 12(2), 214-228.
- Velte, P. (2022). Corporate governance mechanisms and sustainability reporting quality: A systematic review. *Journal of Cleaner Production*, 371, 133679.
- Wahyudi, S. M. (2021). The effect of corporate governance and company characteristics on disclosure of sustainability report companies. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 129-138.
- Wulandari, C. T., & Ayu, P. P. (2026). Green accounting, good corporate governance, and sustainability report disclosure in Indonesian energy companies. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 13(1), 71-86.
- Yanti, N. L., Asmeri, R., & Yani, M. (2025). Pengaruh tekanan stakeholder dan corporate governance terhadap kualitas sustainability report pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 1-13.